

ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS KOMODITI PERTANIAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Sri Hantuti Paramata¹⁾ Yustin Rahman²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
tutiparamata@umgo.ac.id

Abstract

The potential of an area is important to identify, especially potentials that have cooperative and competitive advantages to encourage economic growth. This study aims to analyze the potential of agricultural commodity-based areas in Bone Bolango Regency. The approach taken to conduct research using a qualitative approach. The data source used is the time series data of Brutto Regional Domestic Products for the last five years (2017-2021). The results of the study concluded that the development of agricultural commodity-based areas has not been maximized to encourage the growth and development of the Bone Bolango Regency area in the 2017-2021 period. Based on the analysis using the Location Question (LQ) shows that on average in the period 2017-2021 the LQ value of the agricultural sector is less than one (0.95). This value means that the commodity of agricultural products consisting of the food crop sub-sector, the fishery sub-sector, the plantation sub-sector, and the forestry sub-sector is not yet a base commodity, and is only categorized as a non-base sector.

Keywords: Potential, Region, Commodities, Agriculture

Abstrak

Potensi suatu wilayah menjadi penting untuk diidentifikasi terutama potensi-potensi yang memiliki keunggulan koperatif maupun kempetitif untu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi wilayah berbasis komoditi pertanian di Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang yang dilakukan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data time series Produk Domestik Regional Brutto lima tahun terakhir (2017-2021). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan wilayah berbasis komoditi pertanian belum maksimal untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah Kabupaten Bone Bolango pada periode 2017-2021. Berdasarkan analisis dengan menggunakan Location Question (LQ) menunjukkan rata-rata dalam kurun waktu 2017-2021 nilai LQ sektor pertanian kurang dari satu (0,95). Nilai ini mengandung arti bahwa komoditi hasil-hasil pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perikanan, sub sektor perkebunan, dan sub sektor kehutanan belum merupakan komoditi basis, dan hanya di kategorikan sebagai sektor non basis.

Kata Kunci: Potensi, Wilayah, Komoditi, Pertanian

Received: 11 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 13 Juni 2024

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur berhasil tidaknya suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, BBM, sarana dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mengarah pada tingkat kepuasan masyarakat, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk dapat mencapai hal itu, konsep pembangunan sejak dari perencanaan harus diarahkan pada perwujudan pusat-pusat pelayanan secara adil dan merata dan untuk itu diperlukan teknik-teknik perencanaan pembangunan.

Analisis fungsi wilayah, atau sering disebut juga dengan analisis fungsi, adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh / memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut, dengan menggunakan alat analisis fungsi akan diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah, sehingga akan diketahui penumpukan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah tersebar secara merata, apakah fasilitas yang ada sudah sesuai

dengan fungsinya atau belum. Fungsi di sini adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*customer*).

Dalam melaksanakan analisis fungsi, perencanaan hendaknya tidak terfokus pada keadaan suatu obyek secara fisik saja, melainkan harus benar-benar dilihat dan dianalisis pemanfaatannya, apakah dapat berfungsi atau tidak. Jika masih berfungsi, apakah sesuai untuk peruntukannya atau telah berubah fungsi. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam analisis fungsi, sehingga suatu wilayah pemukiman, yakni kekuatan yang menyangkut fasilitas pelayanan yang dimilikinya.

Berbeda dengan analisis demografis (kependudukan), yang memberikan tambahan wawasan kepada perencanaan mengenai kecenderungan pembangunan pola-pola pemukiman yang dilihat berdasarkan data-data penduduk (yang sangat sedikit bahkan kurang memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi) analisis fungsi memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi aglomerasi (penumpukkan).

Ekonomi aglomerasi, menurut Jenssen dalam Aris Mundar (2010), memiliki peran penting dalam pembangunan, seperti diungkapkannya sebagai berikut: *Anglomeration economies play an important role in development. The extensive range of services and the concentration of economic activities stimulates and exchange. The economic specialization increases efficiency and income. A good acces to market outlets, to the financial system and to a broader labour market reduces production costs and increases income and finally the welfare.*" (Ekonomi penumpukkan berperan penting dalam pembangunan, banyaknya pelayanan dan konsentrasi kegiatan ekonomi merangsang informasi dan pertukaran. Spesialisasi ekonomi meningkatkan efisiensi

dan pendapatan. Akses yang baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih luas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan serta akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan berdimensi wilayah secara umum sering disebut pembangunan ekonomi regional dalam konteks perekonomian makro, misalnya pembangunan ekonomi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam konteks operasional pembangunan berdimensi wilayah terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kawasan tertentu yang merupakan wilayah pembangunan.

Konsep wilayah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya faktor-faktor dominan yang homogen pada suatu wilayah tertentu. Wilayah fungsional diklasifikasikan berdasarkan fungsinya yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Adapun konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah, sehingga pembangunan di wilayah tersebut perlu dilaksanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan yang memperhatikan hal-hal yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berdimensi wilayah, yang berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku, konsep wilayah tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk kawasan.

Dalam proses Perencanaan Daerah, analisis fungsi merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka-kerangka

umum seperti tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan, sehingga memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah.

Kabupaten Bone Bolango dalam perkembangannya hingga saat ini terus fokus dalam mendesain perencanaan pembangunan yang berorientasi pada penyiapan berbagai infrastruktur di semua sektor baik sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam konteks pengembangan wilayah pemerintah daerah berorientasi kepada potensi wilayah yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan data yang ada bahwa dari 18 kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bone Bolango masing-masing kecamatan memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya kecamatan yang terletak di Bone Pesisir tidak memiliki potensi areal persawahan, melainkan hanya memiliki potensi laut dan perkebunan. Wilayah Suwawa, Kabila, Pinogu dan Tapa lebih dominan memiliki areal persawahan.

Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini masih mengandalkan sector pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari 17 sektor lapangan usaha sektor pertanian masih mendominasi kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengetahui bagaimana perkembangan sektor pertanian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone Bolango Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2019-2021

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1	Pertanian	1 038 795.8	1,039.90	1,094.66
2	Pertambangan dan Penggalian	44.72	45.18	47.78
3	Industri Pengolahan	168.70	179.76	199.65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.17	1.25	1.36
5	Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.86	0.98	1.13
6	Konstruksi	325.25	246.42	351.23
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	359.03	399.27	451.51
8	Transportasi dan Pergudangan	32.29	34.00	35.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.54	35.37	37.61
10	Informasi dan Komunikasi	59.53	65.28	70.36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63.52	65.33	63.75
12	Real Estat	72.47	76.49	83.61
13	Jasa Perusahaan	3.59	3.78	4.01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	310.14	315.9	324.23
15	Jasa Pendidikan	129.79	141.17	154.15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.82	156.94	172.40
17	Jasa Lainnya	57.09	59.01	61.63
PDRB Bone Bolango		2,844.41	2,866.03	3,154.91

Sumber: PDRB Bone Bolango 2022

Berdasarkan tabel diatas pertanian paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kemudian pertumbuhan Sektor pertanian mengalami kenaikan 54,76 juta rupiah dimana sektor ini dapat menyediakan lapangan kerja, penyedia berbagai macam bahan makanan, mengurangi angka kemiskinan, dan sebagai penghasil devisa negara. Peranan sektor pertanian pada pembangunan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bone Bolango memiliki pengaruh yang sangat kuat, karena prioritas utama dari sektor pertanian itu sendiri adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertanian merupakan aspek yang diarahkan untuk menghasilkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumber pendapatan petani, menciptakan kesempatan kerja serta

mendorong pemerataan pendapatan (Soekartawi, 2013).

Dalam penelitian ini, kajian relevan yang digunakan berasal dari penelitian: Marsum Maulud, 2004. Identifikasi sektor potensial (unggulan) perekonomian di Kabupaten Merauke, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan ekonomi yang potensial di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 1993 Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua periode tahun 1994–2001. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis Shift Share, analisis Location Quotient (LQ), analisis model rasio pertumbuhan (MRP) dan analisis Overlay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor yang potensial (unggulan) dan memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten

Merauke adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ), sektor unggulan adalah sektor pertanian di mana LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Berdasarkan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) bahwa perekonomian Kabupaten Merauke dalam konteks Provinsi Papua, sektor yang dominan pertumbuhan dan kontribusi yang besar terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Berdasarkan analisis Overlay untuk mengetahui deskripsi bahwa sektor yang berpotensi untuk memberikan pertumbuhan dan kontribusi yang besar adalah sektor pertanian dan sektor yang pertumbuhan besar dan kontribusi kecil terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.

Wiryadi (2001), di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tujuannya adalah identifikasi sektor unggulan untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian tersebut dilakukan selama periode tahun 1993–1999. Alat analisis yang digunakan Location Quotient (LQ), analisis Model Rasio Pertumbuhan dan Analisis Overlay.

Fitri Ami Handayani, 2006. Mengurangi kesenjangan wilayah Gerbangkertosusila Meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Propinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Propinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah. Namun, pada kenyataannya, hingga kini kesenjangan antar Kabupaten dan Kota di

wilayah Gerbangkertosusila tersebut masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan wilayah di Gerbangkertosusila yang ditinjau menurut tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tahap analisis yang pertama adalah menghitung besarnya kesenjangan yang terjadi dengan menggunakan Indeks Williamson. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis pola kesenjangan wilayah dengan Metode Mutidimensional Scaling (MDS). Dari hasil kedua analisis tersebut, dapat diketahui potensi maupun permasalahan pembangunan wilayah di Gerbangkertosusila yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi arahan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan, sehingga pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk kesenjangan lingkungan memiliki pola yang berlawanan. Pembangunan yang dilakukan di Gerbangkertosusila selama ini ternyata berdampak pada peningkatan kesenjangan antar Kabupaten dan Kota di wilayah tersebut. Kesenjangan terutama terjadi antara Kota Surabaya dengan SMA-nya yang meliputi Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dengan wilayah-wilayah belakangnya, yaitu Kabupaten Mojokerto, Lamongan dan Bangkalan. Selain itu, pembangunan di Gerbangkertosusila juga berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan. Menanggapi kecenderungan perkembangan di atas, maka arahan pengembangan wilayah Gerbangkertosusila selanjutnya disarankan untuk menggunakan konsep Integrasi Fungsional, yaitu dengan membagi wilayah-wilayah ke dalam kelompok fungsi tertentu yang bersifat komplementer (saling melengkapi). Pembagian fungsi wilayah tersebut disesuaikan dengan potensi dan permasalahan di masing-masing kabupaten/Kota dan terdiri dari fungsi perdagangan jasa, fungsi produksi primer

(pertanian, peternakan, perikanan dan tambak), serta fungsi produksi sekunder (industri pengolahan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu, suatu penelitian yang Bersifat Deskriptif dan cenderung Menggunakan analisis.

Berdasarkan jenis data yang diambil dan dikumpulkan dari lapangan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat campuran atau yang lebih dikenal dengan mixed method. *"Mixed method research is a research design with philosophical assumptions as well as methods of inquiry. As a methodology, it involves philosophical assumptions that guide the direction of the collection and analysis of data and the mixture of qualitative and quantitative approaches in many phases in the research process. As a method, it focuses on collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative data in a single study or series of studies. Its central premise is that the use of quantitative and qualitative approaches in combination provides a better understanding of research problems than either approach alone"*. (John W Creswell, 2007)

Penelitian metode campuran adalah desain penelitian dengan asumsi-asumsi filosofis dan metode penyelidikan. Sebagai metodologi, *mixed method* melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan analisis data dan serta mencampur antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada setiap tahapan dalam proses penelitian. Sebagai sebuah metode, *mixed method* berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data baik kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal dalam serangkaian penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Riset Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan meliputi :

- a) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara

tertulis maupun secara lisan mengenai masalah-masalah yang diteliti.

- b) Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan data-data sekunder yang diperoleh dari Bappeda dan BPS Kabupaten Bone Bolango.

b. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui buku-buku referensi sebagai landasan teori dalam penelitian

Untuk menjawab tujuan pertama maka digunakan analisis-analisis tentang keterkaitan antara tata ruang wilayah dan potensinya dengan pendekatan-pendekatan perencanaan wilayah dan ekonomi yakni Model Analisis *Location Quotients* (LQ). Analisis LQ merupakan teknik analisis model basis ekonomi yang akan membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (i) Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini dinamakan *industry basic*; dan (ii) Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar hanya di daerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal. Dasar pemikiran teknik analisis LQ ini adalah Teori *Economic Base* yang intinya '*industry basic*' menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah yang bersangkutan maupun di luar daerah, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Gorontalo. Daerah ini merupakan daerah kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten

induknya yaitu kabupaten Gorontalo pada tahun 2003. Daerah Kabupaten Bone Bolango ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Dengan demikian kabupaten Bone Bolango terbentuk bersamaan dengan kabupaten Pohuwato. Saat terbentuknya kabupaten Bone Bolango memiliki 4 kecamatan induk yaitu Suwawa yang saat ini menjadi ibukota kabupaten, kecamatan Kabila, kecamatan Tapa, dan Kecamatan Bonepantai.

Amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak dengan telah berubahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang mengatur tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang saat itu hanya memiliki 3 daerah Kabupaten/kota sementara idealnya minimal lima Kabupaten/kota, maka dengan kondisi ini serta dengan semangat aspirasi yang tinggi seluruh lapisan masyarakat, maka terbentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru yang disingkat dengan KSPKB yang memperjuangkan ke empat kecamatan yang ada (Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai) menjadi satu kabupaten yang dinamakan Kabupaten Bone Bolango.

Dalam perkembangannya hingga saat ini kabupaten Bone Bolango banyak mengalami perkembangan terutama dari aspek pemekaran wilayah dimana saat ini kabupaten Bone Bolango telah memiliki 18 kecamatan, 154 desa dan 4 kelurahan.

Secara geografis kabupaten Bone Bolango terletak antara 00° 18' 25" – 00° 48' 21" LU dan 123° 03' 41" – 123° 33' 06" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Utara, berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Sulawesi Utara);
2. Bagian Timur, berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara;
3. Bagian Selatan, berbatasan dengan Teluk Tomini, dan
4. Bagian Barat, berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah secara prosentase seluas 16,24 % dari luas Provinsi Gorontalo atau tepatnya 1.984,31 km² serta memiliki penduduk pada tahun 2019 sejumlah 141.721 jiwa (BPS;2020). Wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, di mana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah ± 265.000 Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

Pembahasan

Pembangunan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh sumberdaya alam pendukungnya. Semakin baik tata kelola dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, maka akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Kabupaten Bone Bolango adalah merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya disektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan sektor pertanian masih dominan dalam memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rata-rata mencapai lebih dari 40 persen

dibandingkan dengan 16 sektor lapangan usaha lainnya.

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari basis komoditi pertanian yang menggunakan analisis LQ ternyata bahwa sektor pertanian bukanlah merupakan sektor basis atau sektor unggulan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini karena hasil perhitungan hanya memperoleh nilai kurang dari 1 ($LQ < 1$) yang dapat dilihat pada table 7 Analisis LQ dimana rata-rata dalam lima tahun nilai LQ selalu lebih kecil dari 1.

Namun jika dilihat berdasarkan sub-sub sektor dalam sektor pertanian yang terdiri dari: 1) sub sektor tanaman bahan makanan, 2) sub sektor perikanan, 3) sub sektor perikanan, 4) sub sektor perkebunan dan 5) sub sektor kehutanan terdapat 3 sub sektor yang menunjukkan basis atau memiliki keunggulan komparatif karena nilai LQ lebih besar dari 1. Ketiga sub sektor tersebut masing-masing adalah:

1. sub sektor tanaman bahan makanan, yang terdiri dari komoditi padi-padian, sayuran, hoktikultura, kacang-kacangan, dan buah-buahan.
2. Sub sektor perkebunan, yang terdiri dari tanaman yang sifatnya jangka panjang seperti kelapa, tebu, kapas, pohon karet, kelapa sawit.
3. Sub sektor kehutanan, yang terdiri dari kayu-kayuan, Damar, Rotan, dan lain sebagainya mengenai tanaman yang tumbuh dan berkembang di hutan yang memiliki nilai ekonomi.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi wilayah Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari sector pertanian sesungguhnya mampu menjadi sector andalan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Bone Bolango masih di dominasi oleh sektor pertanian dengan sub-sub sektor ikutannya.

Terkait dengan pembangunan ekonomi wilayah, yang masih belum optimal karena

sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis sub sektor pertanian ternyata hanya ada 3 (tiga) sub sektor yang mampu menjadi basis pertanian, dan masih terdapat 2 (dua) sub sektor pertanian yang belum optimal dalam berkontribusi terhadap sektor pertanian. Dengan maka dapat dikategorikan bahwa pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Bone Bolango masih belum berbasis pada sektor pertanian secara keseluruhan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dari penelitian ini, maka beberapa simpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa potensi wilayah berbasis komoditi pertanian menunjukkan belum maksimal untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah Kabupaten Bone Bolango pada periode 2017-2021.
- b. Hasil analisis dengan menggunakan *Location Question* (LQ) menunjukkan rata-rata dalam kurun waktu 2017-2021 nilai LQ sektor pertanian kurang dari satu (0,95). Nilai ini mengandung arti bahwa komoditi hasil-hasil pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perikanan, sub sektor perkebunan, dan sub sektor kehutanan belum merupakan komoditi basis, dan hanya di kategorikan sebagai sektor non basis sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di dibahas dalam penelitian ini, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut;

- a. Produktivitas sektor pertanian harus terus di dorong sehingga sektor pertanian dapat memiliki keunggulan dan benar-benar menjadi sektor basis Kabupaten Bone Bolango.
- b. Untuk dapat mendorong peningkatan produktivitas hasil-hasil komoditi sektor

pertanian perlu adanya pengwilayahan komoditi potensial dan intervensi langsung melalui bantuan-bantuan sarana dan prasarana pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Aris Munandar, 2010, Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah, Tesis
- Arsyad, Lincoln. 2006. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka*.
- Djojodipuro, Marsudi. 2012. *Teori Lokasi*. Jakarta: LPFE UI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 1. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mankiw N, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*, Terjemahan: Fitria Liza, Imam Nurmawan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ningtyas, Betha Rosy. 2013. *Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*
- Richardson, Harry W, 1973. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Sadono Sukirno, 2006, *Makro Ekonomi*, Edisi keempatbelas (alih bahasa Haris Munandar dkk). Jakarta: Erlangga.
-, *Makro Ekonomi*, Edisi keempatbelas (alih bahasa Haris Munandar dkk). Jakarta: Erlangga.
-, 2015, *Makro Ekonomi*, Edisi keempatbelas (alih bahasa Haris Munandar dkk). Jakarta: Erlangga.
- Soetriono dan Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sudarto, 1997, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Suyatno. 2009. *Menjelajah Pembelajaran Inofatif*. (Sidoarjo: Masmedia Buana Pusaka)
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi regional*. Jakarta: Bumi Aksara.
-, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta Erlangga.